

# **OPERASI PERDAMAIAN KOMPI ZENI KONTINGEN GARUDA DALAM RESOLUSI KONFLIK DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (STUDI KASUS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENI)**

**Yogi Priastanto<sup>1</sup>, Agus Subagyo<sup>2</sup>, Yohanes Sulaiman<sup>3</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

## **ABSTRACT**

The ongoing conflict in the Democratic Republic of Congo, particularly in the Beni Province, has prompted the United Nations (UN) to deploy peacekeeping forces to help restore stability and assist in rebuilding efforts. Indonesia, through the Kompi Zeni Kontingen Garuda, plays a vital role in the peacekeeping mission. This research aims to analyze the effectiveness of the Kompi Zeni involvement in conflict resolution and development in the Beni Province. The study addresses key issues such as the operational strategies used, the challenges faced, and the impact of their activities on the local community. A qualitative method was employed, including interviews with personnel and analysis of reports and field observations. The findings reveal that the Kompi Zeni's engineering expertise significantly contributed to rebuilding critical infrastructure, enhancing security, and fostering peace among local populations. This research highlights the novelty of the Indonesian peacekeeping approach by integrating engineering operations with humanitarian efforts, showing how military and civil cooperation can promote long-term conflict resolution.

Keywords: Conflict Resolution, Peacekeeping Operations, Infrastructure Development

## **ABSTRAK**

Konflik yang berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo, khususnya di Provinsi Beni, telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian guna membantu memulihkan stabilitas dan mendukung upaya pembangunan kembali. Indonesia, melalui Kompi Zeni Kontingen Garuda, memainkan peran penting dalam misi penjaga perdamaian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keterlibatan Kompi Zeni dalam resolusi konflik dan pembangunan di Provinsi Beni. Kajian ini membahas isu-isu kunci seperti strategi operasional yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kegiatan mereka terhadap masyarakat setempat. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini, termasuk wawancara dengan personel, analisis laporan, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian teknik Kompi Zeni secara signifikan berkontribusi pada pembangunan kembali infrastruktur penting, peningkatan keamanan, serta perdamaian di antara populasi lokal. Penelitian ini menyoroti kebaruan pendekatan penjaga perdamaian Indonesia yang mengintegrasikan operasi teknik dengan upaya kemanusiaan, menunjukkan bagaimana kerja sama militer dan sipil dapat mempromosikan resolusi konflik jangka panjang.

Keywords: Resolusi Konflik, Operasi Perdamaian, Pembangunan Infrastruktur

## **PENDAHULUAN**

Konflik di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dengan dua perang besar yang terjadi, yaitu Perang Kongo I

(1996-1997) dan Perang Kongo II (1998-2003) (Weiss, 2000). Konflik ini dimulai pada 1990-an karena perselisihan antara etnis Tutsi dan Hutu dalam memperebutkan kekuasaan wilayah. Di tengah konflik tersebut, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila ingin menggulingkan Presiden RD Kongo saat itu, Mobutu Sese Seko, karena dianggap terlalu pro-Amerika (Weiss, 2000). Perang Kongo I melibatkan campur tangan negara-negara tetangga seperti Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda, yang memiliki kepentingan sumber daya alam dan mendukung etnis Tutsi serta menentang rezim pro-Amerika Mobutu. Mobutu akhirnya menyerah dan perang berakhir dengan kemenangan kelompok pemberontak pada tahun 1997, dengan Kabila menjadi Presiden RD Kongo (International Crisis Group, 1998).

Namun, pada tahun 1998, konflik kembali memanas ketika Kabila gagal membagi kekuasaannya secara adil dan mendukung etnis Hutu melawan kelompok pemberontak yang didukung oleh etnis Tutsi. Perang Kongo II melibatkan banyak negara seperti Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe yang mendukung pemerintah Kongo, serta Rwanda, Uganda, dan Burundi yang mendukung pemberontak. Sawyer (2018) juga menyatakan bahwa Pasukan keamanan Kongo dan kelompok bersenjata telah membunuh ribuan warga sipil dalam dua tahun terakhir, menambah sedikitnya enam juta warga Kongo yang meninggal akibat konflik selama dua dekade terakhir – menjadikan konflik di Kongo sebagai yang paling mematikan di dunia sejak Perang Dunia II. Saat ini, sekitar 4,5 juta warga Kongo mengungsi dari rumah mereka lebih banyak dibandingkan negara lain mana pun di Afrika. Puluhan ribu orang telah melarikan diri ke Uganda, Angola, Tanzania, dan Zambia dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan kekhawatiran akan meningkatnya ketidakstabilan regional.

Hal yang serupa juga di alami di Kongo Timur, tepatnya di provinsi Beni. Telah terjadi pembantaian lebih dari 800 orang di wilayah Beni pada tahun 2014 – 2017 . Berdasarkan penelitian yang dilakukan Congo *Research Group*, telah terjadi fase-fase pembunuhan yang berbeda dan beragam aktor bersenjata yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut: *Allied Democrat Forces* (ADF), sebuah kelompok pemberontak Islam Uganda yang berbasis di Kongo timur, mantan perwira dari Tentara Patriotik Kongo (APC), cabang bersenjata dari Gerakan Reli Kongo untuk Demokrasi-Pembebasan (RCD-ML), pemberontakan yang didukung Uganda selama perang kedua Kongo dari tahun 1998 hingga 2003, dan berbagai kelompok milisi lokal lainnya; serta unsur tentara Kongo. Alih-alih pembunuhan dilakukan oleh kelompok yang bersatu dengan agenda politik tunggal, para aktor ini terus-menerus mengubah aliansi yang saling mendukung dan melawan satu sama lain (Human Rights Watch, 2017).

Meskipun reformasi sektor keamanan tertunda, pemerintah telah mengimplementasikan rencana demobilisasi, disarmament, dan reintegrasi (DDR) yang ketiga, yang bertujuan untuk mengatasi mantan pemberontak yang telah dikalahkan. Rencana DDR tersebut menekankan keamanan dan pemindahan mantan kombatan dari komunitas asal mereka, serta penegakan hukum yang lebih ketat sebagai upaya untuk mengakhiri impunitas. Tentu DDR ini dilakukan sebagai bentuk ketidakmampuan *Forces Armées de la République Démocratique du Congo* (FARDC) untuk mengakhiri pertikaian melalui kemenangan militer. Pelaksanaan reformasi keamanan yang dilaksanakan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah Kongo. Hendrickson juga menekankan bahwa reformasi keamanan juga melibatkan kerja sama internasional. Kerja sama pemerintah

Kongo dengan PBB menjadi bagian penting dalam pembangunan perdamaian di Kongo. Pasukan Perdamaian dari masing-masing negara yang terlibat menjadi instrumen PBB dalam penyelenggaraan pembangunan perdamaian di Kongo yang telah mengalami konflik berkepanjangan.

Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB tidak hanya merupakan kewajiban negara untuk memperjuangkan perdamaian global, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian konflik di Kongo. Melalui pengalaman bertempur di luar negeri, TNI dapat meningkatkan kapabilitasnya, yang mungkin berguna dalam mendukung upaya perdamaian di Kongo Timur yang dilanda konflik. Selain itu, kontingen Garuda dapat mempromosikan alutsista buatan dalam negeri dengan menggunakannya dalam misi-misi perdamaian di Kongo, seperti yang terjadi di Lebanon dengan penggunaan panser Anoa. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah terlibat dalam misi-misi perdamaian di Kongo pada tahun 1960-1961 dan 1963-1964 (Garuda II dan Garuda III), sehingga partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB juga memiliki relevansi langsung dengan upaya penyelesaian konflik di Kongo. Dengan hadirnya Indonesia beserta negara-negara anggota PBB lainnya, seharusnya perdamaian di RD Kongo dapat terjadi. Permasalahannya adalah, salah satu permasalahannya adalah permasalahan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ini diakari dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo lebih mementingkan kepentingan jangka pendeknya daripada kesejahteraan rakyat Kongo (Sawyer, 2018).

Tugas utama yang harus segera dilaksanakan oleh Kompi Zeni ini adalah melanjutkan proyek pembuatan jalan Bunia–Beni yang sebelumnya telah dimulai oleh Konga XX-A. Pekerjaan jalan ini telah mencapai tahap ketiga, yaitu dari Komanda sampai Erengeti. Konga XX-B memulai pekerjaannya pada tanggal 5 Oktober 2004 dari Idohu menuju Erengeti dengan panjang lintasan 44 Km, yang dipimpin oleh Danton Bantuan, Lettu Czi Arif Hidayat. Meskipun secara teknis pekerjaan ini tidak terlalu sulit, namun pelaksanaannya di lapangan menghadapi beberapa kendala. Walaupun masih ada jalur jalan lama, namun kondisinya sudah sangat rusak dan beberapa bagian bahkan sudah hancur total, sehingga dibuatlah jalur baru yang kondisinya tidak lebih baik dari jalur lama. Melalui upaya dan kerja keras yang dilakukan, proyek pembuatan jalan ini dapat diselesaikan tepat waktu pada akhir Desember 2004. Dengan selesainya pekerjaan jalan ini, MONUC memiliki jalur logistik utama yang dapat mendukung perbekalan Brigade Ituri. Sebelumnya, semua dukungan logistik untuk Bunia dilaksanakan melalui transportasi udara. Inagurasi peresmian penggunaan jalan ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan DRC yang didampingi oleh Komandan Brigade Ituri serta pejabat MONUC lainnya. Pembukaan jalan ini disambut gembira oleh semua pihak, terutama masyarakat Bunia yang selama ini merasa terisolir dari daerah lainnya.

Di satu sisi, peranan PBB melalui satgas Kizi Monusco ini tidak serta merta sebagai peranan PBB saja. PBB melalui satgas Kizi menjadi *peace builder* di Kongo. Seperti yang kita ketahui jika merujuk pada Galtung (1996) yang menyakatan bahwa perdamaian yang positive disebabkan oleh keterlibatan PBB. Satgas Kizi sebagai representasi PBB melakukan resolusi konflik dengan melaksanakan pembangunan wilayah di Provinsi Beni yang merupakan salah satu kawasan konflik yang besar. Di sisi lain, pembangunan wilayah di Provinsi Beni juga merupakan langkah strategis dalam reformasi keamanan. Konflik yang berkepanjangan di Kongo diawali dari tidak meratanya pembangunan di

sana. Reformasi keamanan ini jika merujuk keamanan manusia akan mensinergikan keseluruhan aspek yang bersifat mikro, seperti kehidupan manusia pada pangan, lingkungan, ekonomi dll. Secara politis, peranan satgas Kizi sebagai representasi PBB menjalankan reformasi keamanan pada pemerintahan sipil yang demokratis (Chanaa, 2002). Ini melibatkan penguatan kapasitas institusi negara untuk mengontrol dan mengawasi sektor keamanan.

Melihat fenomena dan data di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat dan menganalisis secara mendalam mengenai **“Operasi Perdamaian Kompi Zeni Kontingen Garuda Dalam Resolusi Konflik Di Republik Demokratik Kongo (Studi Kasus Pembangunan Wilayah Provinsi Beni)”**. Berdasarkan latar belakang penelitian dan tersebut di atas, maka *research question* atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa penggunaan pasukan Kompi Zeni Satgas Kizi diperlukan untuk mendukung reformasi sektor keamanan di Kongo?

## KERANGKA ANALITIK

### Teori Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, seorang penulis yang dikutip oleh Perwita dan Yani (2011), organisasi internasional adalah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk melalui kesepakatan antara anggota-anggotanya, baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat, dengan tujuan mengejar kepentingan bersama. Untuk dianggap sebagai organisasi internasional, sebuah entitas harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk tujuan yang bersifat internasional, keanggotaan yang terdiri dari negara-negara yang memiliki hak suara, keberadaan anggaran dasar, markas besar, pegawai dari berbagai bangsa atau negara, dan pendanaan yang berasal dari negara-negara berbeda. (Perwita & Yani, 2011). Teuku May Rudy, juga menyumbang pemikiran terkait peran organisasi internasional, menjelaskan bahwa organisasi internasional juga memiliki peran sebagai wadah untuk kerjasama dalam mencegah atau mengurangi konflik, sebagai sarana untuk bernegosiasi dan mencapai keputusan bersama, serta sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan seperti bantuan sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan operasi pemeliharaan perdamaian (Rudy, 1998).

Secara keseluruhan, peran organisasi internasional menunjukkan kebutuhan yang mendesak dalam konteks hubungan internasional, membantu dalam mencapai kepentingan negara dan menyelesaikan masalah global yang tidak dapat diatasi hanya oleh negara-negara secara individual. Dengan perkembangan globalisasi, peran organisasi internasional semakin penting dalam menangani berbagai masalah sosial, ekonomi, kesehatan, hak asasi manusia, perdagangan manusia, dan lain-lain. Kerjasama melalui organisasi internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan global ini.

### Konsep Perdamaian

Kant berpendapat bahwa perang disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum internasional dan demokrasi, dan perdagangan memungkinkan hubungan damai. Oleh karena itu, ada keinginan umum untuk mengadopsi kode etik yang meminimalkan

kekerasan, menciptakan "hukum masyarakat" (Geuss, 2002). Sedangkan Hobbes menyatakan bahwa 'sifat Perang tidak terdiri dari pertempuran yang sebenarnya: tetapi dalam kecenderungan yang diketahui untuk itu, sepanjang waktu tidak ada jaminan untuk sebaliknya. Semua waktu lainnya adalah damai (Hobbes, 2002). Oleh karena itu, perdamaian dibatasi oleh persyaratan keadaan persiapan domestik yang konstan untuk perang. Namun, sifat pemerintahan domestik juga diasumsikan tunduk pada konsep perdamaian yang lebih ambisius, berdasarkan nilai, identitas, dan kepentingan bersama, dalam komunitas yang homogen.

Menurut Bertrand Russel, perdamaian akan dapat terjadi manakala tercipta suatu pemerintahan dunia (Russel, 1992). Menurutnya dengan adanya pemerintahan dunia, maka akan terhindarkan adanya persaingan antara bangsa, yang pada gilirannya nanti persaingan akan menimbulkan suatu peperangan. Meski Russel mengakui adanya hak untuk perang, tetapi dia melihat bahwa perang dapat mengakibatkan kerugian besar-besaran. Dia menunjuk Perang Dunia II sebagai salah satu contohnya. Perang dapat menimbulkan kekacauan dan merusak peradaban manusia (Russel, 1992).

### **Konsep Resolusi Konflik Internasional**

Resolusi konflik menekankan pentingnya upaya untuk mengatasi konflik yang telah mencapai tingkat parah, seperti konflik yang telah mencapai tahap peperangan, agar dapat diselesaikan (Nurhasim, 2008). Menurut Wallenstein (2002), resolusi konflik adalah kondisi di mana pihak-pihak yang bertikai mencapai perjanjian yang memecahkan ketidaksepakatan utama mereka, saling mengakui satu sama lain sebagai pihak yang sah, dan menghentikan segala tindakan kekerasan. Sementara itu, Fisher dan rekan-rekannya (2001) menjelaskan bahwa resolusi konflik melibatkan upaya untuk mengatasi penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang bertikai. Pada penerapan resolusi konflik, Johan Galtung (2000) menerangkan bahwa perdamaian dapat dilakukan dengan menerapkan *peace-making* yaitu strategi atau upaya yang dibentuk untuk mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik, *peace building* yaitu upaya untuk menciptakan perubahan dan merekonstruksi struktur sosial, politik, dan ekonomi guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan, dan *peace keeping* proses yang bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi tindakan kekerasan di wilayah yang sedang konflik dengan menghadirkan intervensi militer yang menjalankan misi perdamaian.

### **Konsep Reformasi Sektor Keamanan**

Pada dasarnya, reformasi sektor keamanan mengakui bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan ekologi. Ini mencerminkan pergeseran dari pandangan yang berpusat pada negara dan militer menuju fokus pada individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, demilitarisasi pemikiran keamanan memainkan peran penting, dengan penekanan pada perlunya melindungi hak asasi manusia dan keamanan warga negara. Reformasi sektor keamanan juga melibatkan perubahan dalam cara pemikiran dan praktik keamanan, termasuk restrukturisasi angkatan bersenjata, pendirian kontrol sipil yang demokratis, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan keamanan. Namun, di beberapa negara, implementasi reformasi sering kali dipengaruhi oleh politik lokal dan tekanan internasional, dan terkadang dapat dianggap sebagai konsesi kepada kekuatan asing.

Pentingnya reformasi sektor keamanan terletak pada pengakuan bahwa keamanan bukan hanya masalah militer, tetapi juga melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam mencapai keamanan yang berkelanjutan dan adil (Buzan, Weaver, & Wilde, 1999).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan agar dapat menafsirkan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat mendeskripsikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diamati oleh peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu, *library research*, *field research*, dan wawancara. Dalam penelitian ini data di analisis dengan cara Triangulasi yaitu: Reduksi Data, Tampilan Data, serta Kesimpulan dan Verifikasi.

## PEMBAHASAN

### Latar Belakang Konflik Panjang Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratik Kongo (RDK) telah mengalami konflik yang berkepanjangan sejak akhir abad ke-20, yang dimulai dengan jatuhnya rezim Mobutu Sese Seko pada tahun 1997. Perang Kongo Pertama, yang melibatkan beberapa negara Afrika, menjadi awal dari kekacauan politik dan keamanan di negara tersebut. Konflik ini dipicu oleh ketidakstabilan politik, korupsi, dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Setelah tumbanganya Mobutu, perang Kongo Kedua pecah pada 1998, melibatkan sembilan negara dan puluhan kelompok bersenjata, menjadikannya salah satu konflik terburuk di dunia. Faktor ekonomi, terutama perebutan sumber daya alam seperti emas, berlian, dan coltan, memperparah situasi konflik ini.

Meski perang Kongo Kedua secara resmi berakhir pada 2003 dengan penandatanganan perjanjian damai, kekerasan bersenjata terus berlanjut di beberapa bagian negara, terutama di wilayah timur. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, yang menjadi rebutan antara berbagai kelompok pemberontak dan milisi lokal. Kelompok-kelompok ini seringkali mendapat dukungan dari negara-negara tetangga yang ingin memanfaatkan kekayaan alam RDK. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok pemberontak baru seperti Allied Democratic Forces (ADF) dan kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Perlawanan Tuhan (LRA) memperparah ketidakstabilan di RDK. Situasi ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, dengan jutaan orang terlantar dan ribuan nyawa melayang.

Di tengah kekacauan ini, pemerintah RDK mengalami kesulitan dalam mengendalikan situasi karena lemahnya institusi negara dan tentara yang kurang terlatih. Militer RDK, yang dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo (FARDC), sering kali kurang disiplin dan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memicu ketidakpercayaan dari rakyat. Kondisi ini diperburuk oleh intervensi negara-negara tetangga seperti Rwanda dan Uganda, yang terlibat langsung dalam konflik untuk mengamankan sumber daya alam dan pengaruh politik di wilayah tersebut. Konflik

yang berlarut-larut ini juga telah menarik perhatian komunitas internasional, yang berupaya melalui berbagai mekanisme, termasuk misi perdamaian PBB, untuk mengakhiri kekerasan dan memulihkan stabilitas. Namun, kompleksitas konflik yang melibatkan berbagai aktor membuat upaya perdamaian sulit tercapai.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Misi Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) telah berperan penting dalam menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil sejak 1999. Namun, meski MONUSCO memiliki mandat yang kuat, tantangan yang dihadapi sangat besar mengingat skala konflik dan sulitnya medan di wilayah timur. Selain itu, banyak kelompok bersenjata yang enggan berdamai karena kepentingan ekonomi mereka dalam eksploitasi sumber daya alam. Kurangnya koordinasi antara pasukan perdamaian PBB dan FARDC juga memperlambat upaya penyelesaian konflik. Meskipun demikian, beberapa wilayah berhasil meraih kestabilan sementara, meskipun ancaman dari kelompok pemberontak tetap ada.

Saat ini, konflik di RDK masih belum terselesaikan sepenuhnya, terutama di provinsi-provinsi seperti Beni dan Kivu Utara. Serangan sporadis dari milisi dan kekerasan antaretnis terus terjadi, menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga terhambat akibat kekerasan ini. Komunitas internasional terus berupaya membantu melalui misi kemanusiaan dan perdamaian, namun solusi jangka panjang membutuhkan reformasi institusi dalam negeri dan dialog antara berbagai kelompok yang terlibat. Oleh karena itu, stabilitas politik dan rekonstruksi ekonomi di RDK menjadi kunci dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

**Intensi Dunia Internasional pada Konflik Berkepanjangan Republik Demokratik Kongo**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki perhatian besar terhadap konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) karena dampaknya terhadap stabilitas regional dan kemanusiaan. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kematian massal, tetapi juga menimbulkan krisis pengungsi dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Untuk menangani situasi tersebut, PBB menginisiasi berbagai misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Misi PBB bertujuan mengurangi kekerasan, melindungi warga sipil, serta memfasilitasi dialog politik antara pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, PBB berusaha mengatasi akar masalah konflik, termasuk perebutan sumber daya alam dan ketidakstabilan politik. Melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan, PBB berkomitmen mendukung upaya perdamaian jangka panjang di Kongo.

Pasukan perdamaian PBB, melalui Misi Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas di wilayah yang dilanda konflik. Pasukan ini tidak hanya bertugas sebagai pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam operasi militer untuk melindungi warga sipil dari serangan milisi. MONUSCO juga mendukung proses politik dengan memfasilitasi perundingan damai antara kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintah RDK. Selain operasi militer, pasukan perdamaian PBB terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti mendistribusikan bantuan dan membantu pemulihan infrastruktur. Keberadaan MONUSCO membantu meredakan kekerasan di beberapa wilayah, meskipun tantangan tetap ada karena luasnya

wilayah konflik dan banyaknya kelompok bersenjata. Keberhasilan misi ini sangat tergantung pada kerja sama dengan pemerintah lokal dan aktor internasional lainnya.

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung misi perdamaian PBB dengan mengirimkan personel militer ke berbagai zona konflik, termasuk RDK. Sejak pertama kali berpartisipasi dalam misi perdamaian pada 1957, Indonesia kini menjadi salah satu penyumbang terbesar personel penjaga perdamaian. Keterlibatan Indonesia di Kongo menjadi contoh bagaimana TNI berperan aktif dalam menjaga perdamaian global melalui operasi PBB. Selain menjalankan tugas keamanan, pasukan Indonesia juga terlibat dalam misi-misi kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur di daerah konflik. Keikutsertaan Indonesia dalam misi MONUSCO memperkuat diplomasi internasional dan mencerminkan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Kontribusi Indonesia diakui oleh PBB sebagai bagian penting dari upaya menjaga perdamaian di Kongo.

Kompi Zeni Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Republik Demokratik Kongo. Pasukan ini fokus pada pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang rusak akibat perang. Perbaikan jalan yang dilakukan oleh Kompi Zeni sangat vital dalam memfasilitasi mobilitas warga dan pasokan logistik. Selain itu, pembangunan jembatan menjadi solusi penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks misi perdamaian, kontribusi ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah konflik, tetapi juga membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat setempat. Kompi Zeni menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di Kongo.

Salah satu tugas utama Kompi Zeni Indonesia di RDK adalah memperbaiki jaringan jalan yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Kondisi jalan di banyak wilayah Kongo sangat memprihatinkan dan menghambat mobilitas warga serta distribusi bantuan kemanusiaan. Dengan keahlian di bidang teknik, Kompi Zeni membangun dan memperbaiki jalan, yang menjadi urat nadi perekonomian dan keamanan di daerah-daerah yang terdampak konflik. Perbaikan jalan ini tidak hanya membantu operasi militer dan keamanan, tetapi juga mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dengan mempermudah akses ke pasar, sekolah, dan rumah sakit. Pekerjaan yang dilakukan Kompi Zeni di lapangan menjadi langkah penting dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang dilanda konflik. Tugas ini berkontribusi pada stabilitas jangka panjang dan pembangunan sosial-ekonomi di Kongo.



*Gambar 1. Proses pembuatan jalan Eringeti–Kainama Road (Ismawan, 2023)*

Pembangunan jembatan oleh Kompi Zeni Indonesia menjadi solusi penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Banyak daerah di Kongo yang sulit diakses karena jembatan hancur atau tidak memadai, yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan membangun jembatan, Kompi Zeni membantu menghubungkan desa-desa yang terisolasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Pembangunan jembatan juga memainkan peran penting dalam operasi militer dan logistik, memungkinkan pasukan perdamaian PBB untuk merespons ancaman dengan lebih cepat. Selain dampak ekonomi, pembangunan jembatan ini juga memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat, yang mulai melihat tanda-tanda perbaikan setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik.

Pembangunan jembatan oleh Kompi Zeni Indonesia menjadi solusi penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Banyak daerah di Kongo yang sulit diakses karena jembatan hancur atau tidak memadai, yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan membangun jembatan, Kompi Zeni membantu menghubungkan desa-desa yang terisolasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Pembangunan jembatan juga memainkan peran penting dalam operasi militer dan logistik, memungkinkan pasukan perdamaian PBB untuk merespons ancaman dengan lebih cepat. Selain dampak ekonomi, pembangunan jembatan ini juga memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat, yang mulai melihat tanda-tanda perbaikan setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik.



**Gambar 2. Jembatan yang telah dibangun oleh Kompi Zeni**

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kompi Zeni Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal di Kongo. Dengan memperbaiki jalan dan membangun jembatan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin terbuka. Pembangunan ini juga mengurangi isolasi wilayah-wilayah tertentu, yang sebelumnya sulit dijangkau karena rusaknya infrastruktur akibat konflik. Keberhasilan dalam memperbaiki infrastruktur juga meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, karena memungkinkan mobilitas yang lebih cepat bagi

pasukan perdamaian dan otoritas lokal. Selain itu, inisiatif ini menunjukkan bagaimana peran militer tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah konflik. Hal ini memberikan kontribusi nyata terhadap perdamaian jangka panjang.

Meskipun kontribusi pasukan perdamaian PBB, termasuk Kompi Zeni Indonesia, sangat berarti, tantangan dalam menjalankan misi ini tetap besar. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas medan dan sulitnya akses ke wilayah-wilayah yang paling terdampak konflik. Selain itu, situasi keamanan yang tidak stabil, dengan kehadiran kelompok bersenjata, sering kali menghambat upaya perdamaian dan pembangunan infrastruktur. Faktor politik dan ketidakstabilan di dalam negeri juga menjadi kendala, karena adanya ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Meskipun demikian, pasukan perdamaian PBB terus berupaya menjalankan mandat mereka dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai stabilitas dan pembangunan jangka panjang di Kongo. Upaya yang berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan perdamaian yang abadi.

## KESIMPULAN

Republik Demokratik Kongo (DRC) mengalami konflik berkepanjangan sejak kemerdekaannya dari Belgia pada tahun 1960. Konflik ini melibatkan perang saudara, pertikaian politik antara pemimpin nasionalis seperti Patrice Lumumba dan kelompok pro-Barat, serta pemberontakan yang melibatkan negara-negara tetangga seperti Rwanda dan Uganda. Wilayah Beni di Kongo Timur, khususnya di Provinsi Kivu Utara, merupakan area yang sangat rentan terhadap konflik etnis, politik, dan kekerasan yang berakar dari berbagai faktor seperti kontrol atas tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan identitas etnis. Kompi Zeni adalah satuan khusus dalam TNI Angkatan Darat yang berfokus pada tugas-tugas teknik militer. Mereka bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur militer seperti jembatan, jalan, dan bangunan pertahanan, serta memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau menembus pertahanan musuh, membersihkan ranjau, dan menyingkirkan rintangan lainnya. Perjalanan Kompi Zeni MONUSCO di Kongo dapat dibagi menjadi beberapa fase penting yang mencerminkan peran vital mereka dalam misi perdamaian dan stabilisasi di negara tersebut. Misi utama mereka adalah membantu dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas militer yang dibutuhkan oleh MONUSCO dalam mendukung operasi perdamaian di daerah yang dilanda konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bellamy, A. J. (2011). The Responsibility to Protect—Five Years On. *Ethics & International Affairs*, 24(2)
- Doss, A. (2014). United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO). In J. A. Koops, *The Oxford Handbook of*

- United Nations Peacekeeping Operations* (pp. 803–817). Oxford: Oxford University Press.
- Geuss, R. (2002). Liberalism and its Discontents. *Political Theory*, 30(3).
- Kaldor, M. (2013). In Defence of New Wars. *Stability: International Journal and Development*, 2(1)
- Meran, M. (2019). Perdamaian Dalam Prspektif Katolik dan Islam. *Jurnal Jumpa*, 7(2), 73 – 91
- Mill, D. V. (2002). Civil Liberty in Hobbes’s Commonwealth. *Australian Journal of Political Science*, 37(1)
- Russo, J. (2021). Militarised Peacekeeping: Lessons from the Democratic Republic of the Congo. *Third World Quarterly*, 42(12).
- Buku/Disertasi**
- Atack, I. (2005). *The Ethics of Peace and War*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Buzan, B., Weaver, O., & Wilde, J. d. (1999). *Security, A New Framework for Analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Chanaa, J. (2002). *Security Sector Reform: Issues, Challenges and Prospects*. New York: Oxford University Press Inc.
- Chandler, D. (2004). The Responsibility to Protect? Imposing the ‘Liberal Peace’. *International Peacekeeping*.
- Coulumbis, T., & Wolfe, J. H. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional : Power and Justice*. Bandung: Putra Bardin.
- Fluri, P., & Hadžić, M. (2004). *Sourcebook on Security Sector Reform*. Genewa: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications.
- Hendrickson, D. (1999). *A Review of Security Sector Reform*. London: King’s College Working Papers
- Hobbes, T. (2002). *Leviathan*. New York: Simon & Schuster.
- International Crisis Group. (1998). *Congo at War*. International Crisis Group.
- Ismawan, A. (2023). *Prajurit Zeni TNI-AD di Kongo: 20 Tahun Pengabdian*. Jakarta Selatan: Kata Hasta Pustaka.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global : dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jeong, H. W. (2010). *Conflict Management and Resolution*. New York : Routledge.
- Leal, M. F. (2024). *Evaluating the Effectiveness of MONUSCO: Successes and Challenges of United Nations Peacekeeping Operations in the Democratic Republic of the Congo*. Stockholm: Department of Economic History and International Relations Stockholm University.
- Mas’oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mill, D. V. (2002). Civil Liberty in Hobbes’s Commonwealth. *Australian Journal of Political Science*, 37(1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mwambusa, P. M., Kandate, E., Ireng, L., Mupenda, P. K., Munguakonkwa, D., & Matete, J. (2021). *Political actors and identity-based violence in Beni, Democratic Republic of Congo*. Bukavu: Research Initiatives for Social Development (RISD).

- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rudy, T. M. (1998). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Samarinda: Dinas Perpustakaan Kota Samarinda.
- Russel, B. (1992). *Dampak Ilmu Pengetahuan Atas Masyarakat*. (Irwanto, & R. H. Imam, Trans.) Jakarta: Gramedia.
- Siswanto, H., Sulistio, H., Djakfar, L., & Wicaksono, A. (2016). *Sisatem Manajemen Jalan dan Kondisi Kerusakan Jalan di Indonesia: Sebuah Kajian Pustaka. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah IX (ATPW)*. Surabaya
- Weiss, H. (2000). *War and Peace in the Democratic Republic of the Congo*. Uppsala: Nordiska Afrika Institutet.

### **Sumber Internet**

- Darwanto, H. (2015, Desember). *Misi Global TNI*. Retrieved from Kementerian Pertahanan RI: <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/7fe609ac0e303ca26f42300e614b48d4.pdf>
- Etahoben, B. (2021, November 24). *ADF Rebels Attack Kainama Village In DR Congo, Kill 1 Civilian*. Retrieved from HumAngel: <https://humanglemedia.com/adf-rebels-attack-kainama-village-in-dr-congo-kill-1-civilian/>
- Human Rights Watch. (2017, Oktober 6). *Three-Year Mystery Behind DR Congo's Beni Massacres Unravels*. Retrieved from Human Rights Watch: [https://www-hrw-org.translate.goog/blog-feed/democratic-republic-congo-crisis?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-hrw-org.translate.goog/blog-feed/democratic-republic-congo-crisis?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Pentak PMPP TNI. (2022, 11 04). *Satgas Kizi TNI Konga XX-S Monusco Melakukan Perbaikan Jalan di Monusco Base Mavivi, Republik Demokratik Kongo*. Retrieved from Indonesian Armed Forces Peacekeeping Cencter: <https://pmpp-tni.mil.id/2022/11/04/satgas-kizi-tni-konga-xx-s-monusco-melakukan-perbaikan-jalan-di-monusco-base-mavivi-republik-demokratik-kongo/>
- Sawyer, I. (2018, April 13). *The Congolese Government is at war with its people*. Retrieved from Open Democracy: [https://www-opendemocracy-net.translate.goog/en/congolese-government-is-at-war-with-its-people/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-opendemocracy-net.translate.goog/en/congolese-government-is-at-war-with-its-people/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- United Nations Development Programme. (1994). *New dimensions of human security In Human Development Report*. Retrieved from United Nations: <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210576550c005>